

Analisis Penerapan SAK EMKM dalam Penyusunan Laporan Keuangan UMKM (Studi Kasus di Kabupaten Kudus)

Aula Mustaghfiroh¹, Tina Martini²

IAIN Kudus^{1,2}

Email: aulaamustaghfiroh12@gmail.com¹, tina@iainkudus.ac.id²

Abstract

Limited understanding and application of the SAK EMKM by MSME actors result in unstructured financial report recording. This research aims to determine the understanding of MSME actors in the Kudus Regency regarding SAK EMKM and to analyze the obstacles and benefits of its implementation. This research uses a descriptive qualitative approach with primary data from in-depth interviews with 5 MSMEs registered with the Kudus Regency Industry, Cooperatives, and MSME Service in 2024. Of these, five informants have implemented SAK EMKM and act as preparers of financial reports in their businesses. The research results show that some MSMEs have prepared financial reports by SAK EMKM, although they are not yet complete. The main obstacles include difficulties recording small transactions, unstructured cost classification, and limited understanding and technical assistance. However, implementing SAK EMKM provides benefits such as increased financial transparency, easier access to funding, and more professional business management. Therefore, this research recommends continuous education, technical training, and regulatory support from the government to increase the implementation of SAK EMKM among MSMEs in Kudus Regency.

Keywords: SAK EMKM; MSME; Financial Reports; Application of SAK.

Abstrak

Keterbatasan pemahaman dan penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) oleh pelaku UMKM menyebabkan pencatatan laporan keuangan yang tidak terstruktur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman pelaku UMKM Kabupaten Kudus terhadap SAK EMKM serta menganalisis kendala dan manfaat penerapannya. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini dengan data primer melalui wawancara mendalam terhadap 5 UMKM yang terdaftar pada Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kudus tahun 2024. Dari jumlah tersebut, kelima narasumber telah menerapkan SAK EMKM dan berperan sebagai penyusun laporan keuangan dalam usaha mereka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UMKM telah menyusun laporan keuangan sesuai SAK EMKM, meskipun belum sepenuhnya lengkap. Kendala utama meliputi kesulitan pencatatan transaksi kecil, penggolongan biaya yang tidak terstruktur, serta keterbatasan pemahaman dan pendampingan teknis. Namun, penerapan SAK EMKM memberikan manfaat seperti peningkatan transparansi keuangan, kemudahan akses pendanaan, dan pengelolaan usaha yang lebih profesional. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi berkelanjutan, pelatihan teknis, serta dukungan regulasi dari pemerintah untuk meningkatkan penerapan SAK EMKM di kalangan UMKM di Kabupaten Kudus.

Kata Kunci: SAK EMKM; UMKM; Laporan Keuangan; Penerapan SAK.

PENDAHULUAN

Data BPS menunjukkan perekonomian Indonesia mengalami kontraksi sebesar 2,07% pada tahun 2020. Penurunan signifikan ini terjadi akibat pandemi Covid-19 yang memaksa pemerintah menerapkan berbagai pembatasan untuk mengendalikan penyebaran virus. Kebijakan pembatasan tersebut berdampak luas terhadap berbagai sektor ekonomi. Konsumsi rumah tangga dan LNPRRT mengalami penurunan, yang kemudian mempengaruhi PDB secara keseluruhan. Sektor investasi juga terdampak, dengan pertumbuhan yang merosot dari 3,25% menjadi 1,94%, terutama disebabkan oleh berkurangnya lapangan pekerjaan (Badan Pusat Statistik, 2024).

Data yang dirilis oleh kepala BPS mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 tercatat positif sebesar 3,69 persen dengan total PDB mencapai Rp16.970,8 triliun dan PDB per kapita sebesar Rp62,2 juta (US\$ 4.349,5). Di antara berbagai sektor ekonomi, pertumbuhan tertinggi tercatat pada sektor jasa kesehatan (10,46%) dan ekspor barang/jasa (24,04%). Secara spasial, pada 2021, 57,89% perekonomian Indonesia berasal dari provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Pada 2022, PDB Indonesia mencapai Rp19.588,4 triliun. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 5,31% melampaui tahun 2021 yang mencapai 3,70%. Sektor transportasi dan perdagangan mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 19,87% (Badan Pusat Statistik, 2024).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia ditandai oleh kemajuan berbagai sektor bisnis, terutama pengembangan UMKM yang berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Adanya UMKM memberikan banyak kontribusi untuk sekitar, seperti menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, meningkatkan pendapatan, serta mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. UMKM menjadi bentuk usaha yang layak dimiliki oleh kelompok maupun individu, dengan mayoritas dikelola oleh komunitas yang luas. UMKM memainkan peran strategis dan berdampak besar di negara berkembang dan maju. Di kedua jenis negara tersebut, UMKM memainkan peran vital karena menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dibandingkan dengan perusahaan besar. Bahkan, kontribusi UMKM terhadap peningkatan produk domestik bruto (PDB) sering kali lebih signifikan dibandingkan perusahaan besar (Putri, 2021). Perekonomian nasional di Indonesia dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan waktu mengalami penurunan. Hal ini juga menunjukkan bahwa masih dibutuhkan pemahaman yang mendalam mengenai konsep unit dalam penyusunan laporan keuangan, yang menjadi dasar penting dalam proses pembuatan laporan keuangan. Pemahaman terhadap konsep unit ini merupakan elemen penting dalam menentukan penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam SAK. Namun, salah satu permasalahan yang dihadapi oleh UMKM adalah

kelemahan dalam penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan yang baik sangat penting sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja usaha, pengambilan keputusan, dan memenuhi kebutuhan pihak eksternal, seperti investor, perbankan, atau pemerintah. Untuk mengatasi hal tersebut, IAI telah mengeluarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) yang bertujuan memberikan panduan sederhana dan relevan bagi UMKM dalam penyusunan laporan keuangan (Sulistyawati, 2020).

Namun, penerapan SAK EMKM di lapangan masih menemui berbagai kendala. Hanya sebagian kecil UMKM yang telah menerapkan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan mereka. Rendahnya penerapan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman pelaku UMKM terhadap standar akuntansi, minimnya pendampingan dari pihak terkait, hingga keterbatasan sumber daya yang dimiliki UMKM. Berdasarkan penjabaran dan penjelasan diatas peneliti sebelumnya juga berpendapat bahwa mayoritas pelaku UMKM tidak menggunakan pencatatan laporan keuangan berdasarkan SAK yang berlaku di Indonesia. Hal lain juga dapat dilihat bahwasanya UMKM hanya mencatat keuntungan dalam menjalankan bisnisnya atau usahanya. Selain itu, kurangnya informasi atau pembekalan dari dinas setempat mengenai penyusunan pembukuan akuntansi. Pemerintah, melalui Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM sebaiknya berperan aktif sebagai penghubung antara Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan pemilik UMKM untuk mensosialisasikan pentingnya penerapan SAK-EMKM. Hal ini bertujuan agar pengelola UMKM di masa depan dapat menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku (Ayu & Banjarnahor, 2023).

Studi ini menjadi krusial mengingat posisi strategis UMKM sebagai kontributor utama PDB nasional dan motor penggerak pemulihan ekonomi. Tujuannya adalah mengkaji implementasi SAK EMKM dalam praktek keuangan UMKM, sambil mengembangkan sistem akuntansi yang mudah diterapkan namun tetap memenuhi standar. Kajian juga mencakup evaluasi langkah pengembangan yang telah ditempuh. Hasil penelitian ini memberikan terobosan penting dalam memahami implementasi SAK EMKM di kalangan UMKM di Kabupaten Kudus. Dengan analisis mendalam terhadap lima pelaku usaha yang telah menerapkan standar ini, penelitian ini membuktikan bahwa penerapan SAK EMKM tidak hanya meningkatkan transparansi dan akurasi laporan keuangan, tetapi juga mempermudah akses pembiayaan serta mendukung keberlanjutan usaha. Temuan ini memberikan wawasan baru bagi pemilik UMKM dalam menilai performa usaha mereka secara lebih terstruktur, sekaligus menjadi landasan kuat bagi pengambil kebijakan dalam merancang strategi pendampingan yang lebih efektif.

KAJIAN LITERATUR

Pengertian Akuntansi

Akuntansi merupakan komponen esensial dalam setiap usaha karena menyediakan informasi keuangan akurat. Setiap usaha membutuhkan akuntansi untuk mengelola transaksi keuangan secara efektif. (Sastroatmodjo, S. dan Purnairawan E., 2021) mendefinisikan akuntansi sebagai proses pencatatan dan pengolahan transaksi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan bermanfaat. Akuntansi adalah pengolahan data keuangan menjadi laporan sistematis untuk pengambilan keputusan. Pencatatan transaksi dilakukan dalam bentuk jurnal, sedangkan penggolongan adalah proses penyusunan akun-akun dalam buku besar yang disesuaikan dengan peristiwa atau transaksi yang telah terjadi, berdasarkan bukti transaksi yang ada. Pengikhtisaran adalah tahap akhir proses akuntansi sebelum penyusunan laporan keuangan.

Dalam jurnal Thomas, akuntansi dijelaskan sebagai bahasa bisnis yang berfungsi sebagai alat untuk sistem pelaporan dan pencatatan transaksi yang terjadi dalam suatu entitas. Informasi akuntansi merupakan sumber data strategis yang digunakan oleh berbagai pihak untuk menilai kinerja, membuat keputusan dan melakukan pengendalian keuangan. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menyatakan bahwa akuntansi adalah ilmu yang berfokus pada pencatatan, analisis, dan komunikasi transaksi atau peristiwa ekonomi, dengan tujuan menghasilkan informasi yang relevan bagi pihak-pihak yang menginginkan untuk pengambilan sebuah keputusan. Sementara itu, Menurut (AICPA (American Institute of Certified Public Accountants, n.d.) akuntansi merupakan seni pencatatan, pengelolaan, pengikhtisaran dan penafsiran transaksi serta peristiwa keuangan dalam satuan uang.

Konsep Dasar Akuntansi

Konsep dasar akuntansi adalah suatu konsep yang berlaku secara umum tentang suatu asumsi, anggapan, pandangan atau pendapat dalam menyajikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang telah berkepentingan (Rahardjo, 2020). Perusahaan dianggap sebagai entitas ekonomi yang berdiri sendiri, terpisah dari pihak-pihak yang berkepentingan. Konsep dasar akuntansi merujuk pada prinsip-prinsip fundamental yang menjadi landasan pembentukan informasi akuntansi. Konsep dasar akuntansi sangat penting untuk memahami cara mengelola dan mengatur data keuangan secara efektif dalam suatu organisasi atau perusahaan.

Terdapat empat jenis utama kegiatan akuntansi, yaitu pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan. Setiap kegiatan ini memiliki peran yang sangat penting dalam dunia bisnis. Berikut penjelasan mengenai masing-masing kegiatan akuntansi tersebut:

1. Pencatatan (*Recording*)

Pencatatan merupakan aktivitas yang melibatkan penulisan semua transaksi keuangan bisnis ke dalam dokumen bukti transaksi dan jurnal dengan cara yang akurat dan teratur. Contohnya, mencatat transaksi penjualan kredit dalam bukti transaksi nota kredit.

2. Penggolongan (*Classifying*)

Penggolongan adalah proses mengelompokkan berbagai transaksi yang terjadi ke dalam akun-akun tertentu di buku besar. Misalnya, transaksi penjualan kredit akan dimasukkan ke dalam jurnal khusus penjualan.

3. Peringkasan (*Summarizing*)

Peringkasan adalah langkah untuk memindahkan dan merangkum semua transaksi yang telah dicatat di buku besar untuk disusun dalam laporan neraca saldo.

4. Pelaporan (*Reporting*)

Pelaporan dalam akuntansi melibatkan penyusunan laporan keuangan, yang mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan yang menyertai laporan keuangan tersebut.

Dengan pemahaman yang jelas mengenai keempat kegiatan ini, bisnis dapat melakukan akuntansi dengan lebih efektif dan efisien.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Menurut (S. M. Rahayu, W. Ramadhanti, 2020) penyusunan laporan keuangan yang baik memberikan beberapa kelebihan bagi UMKM. Laporan keuangan membantu usaha memahami kondisi keuangan dan mendapatkan keuntungan pajak. Terdapat dua keuntungan pajak yang dapat diperoleh dari laporan keuangan. Pertama, pajak dikenakan atas keuntungan usaha, yang diperoleh dari selisih antara penghasilan dan beban, bukan dari penghasilan secara langsung. Kedua, apabila perusahaan mengalami kerugian, maka kewajiban untuk membayar pajak tidak berlaku. Selain itu, banyak lembaga, termasuk pemerintah, bank, perusahaan pembiayaan, dan para donor, menawarkan berbagai bantuan dan fasilitas untuk mendukung perusahaan.

Menurut (Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan, 2008) dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), usaha mikro didefinisikan sebagai usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha perorangan serta memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan dalam peraturan tersebut. Usaha mikro merupakan bentuk usaha ekonomi yang bersifat mandiri, dijalankan oleh perorangan atau badan usaha, dan tidak berstatus sebagai anak perusahaan maupun cabang dari perusahaan besar atau menengah yang dimiliki, dikendalikan, atau terhubung baik secara langsung maupun tidak

langsung. Selain itu, undang-undang tersebut juga mengatur kriteria untuk usaha kecil dan menengah. Secara umum, UMKM mencakup berbagai sektor usaha, seperti perdagangan, industri, jasa, pertambangan, dan real estate.

Laporan Keuangan

Pemerintah menempatkan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu prioritas utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Laporan keuangan, yang terdiri dari empat elemen utama—posisi keuangan, laba/rugi, perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan (CALK)—memiliki peran krusial dalam menyajikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja perusahaan. Melalui analisis laporan keuangan, berbagai pemangku kepentingan, seperti investor, kreditor, dan manajemen, dapat memperoleh informasi penting untuk memahami kondisi keuangan perusahaan. Informasi ini sangat berguna dalam pengambilan keputusan bisnis yang lebih tepat serta dalam optimalisasi strategi yang akan diterapkan (Muhardi, 2023).

Dalam ketentuan PSAK 1, laporan keuangan didefinisikan sebagai suatu bentuk penyajian sistematis yang menggambarkan kondisi dan performa keuangan sebuah entitas. Dokumen ini, menurut PSAK 1, merupakan salah satu elemen dalam sistem pelaporan keuangan. Ketika mengacu pada SAK EMKM, laporan posisi keuangan harus mencakup tujuh komponen: kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap, utang usaha, utang bank, dan ekuitas. SAK EMKM tidak menentukan format atau urutan terhadap akun-akun dalam penyajiannya (IAI, 2015).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut (Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI, 2016):

1. Laporan keuangan menyajikan informasi akurat, komprehensif, dan transparan tentang posisi keuangan, kinerja, dan perubahan keuangan suatu entitas.
2. Laporan keuangan disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi sebagian besar pengguna.
3. Laporan keuangan mencerminkan kinerja manajemen dan pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya, membantu pengguna menilai efektivitas strategi, mengidentifikasi peluang dan risiko, serta mengambil keputusan ekonomis.
4. Penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan memastikan akuntabilitas, relevansi, keandalan, dan transparansi, sehingga mendukung pengambilan keputusan ekonomis strategis dan berkelanjutan.

Meskipun laporan keuangan disusun secara sederhana, hal tersebut tidak menjadi masalah yang besar, karena yang terpenting bagi koperasi atau bank adalah tercatatnya setiap transaksi keuangan yang dilakukan, (Indra, 2019). Laporan keuangan juga memiliki beberapa komponen berikut ini:

1. Laporan posisi keuangan
2. Laporan laba/rugi
3. Laporan perubahan ekuitas
4. Catatan atas laporan keuangan

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah

Tingkat dalam pemahaman seseorang terhadap standar akuntansi mencerminkan kemampuan mereka untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi dengan tepat dan efektif, (Herwiyanti, Eliada, Permata Ulfah, 2020). SAK EMKM mencakup tiga indikator utama: pengukuran, asumsi dasar, dan penyajian laporan keuangan. Pemahaman serta sosialisasi mengenai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) sangat krusial bagi keberlangsungan usaha Ultra Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi dan pelatihan perlu diperkuat dan dioptimalkan, sehingga UMKM mampu menyusun laporan keuangan yang akurat, efektif, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 memberikan definisi dan kriteria kuantitatif yang jelas untuk mengkategorikan usaha mikro, kecil, dan menengah, (Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan, 2008). SAK ini dirancang khusus untuk entitas yang belum memenuhi kriteria dan persyaratan akuntansi dalam SAK ETAP.

SAK EMKM mulai ditetapkan pada 1 Januari 2018 sebagai panduan dalam penyusunan laporan keuangan bagi UMKM. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan pedoman baku yang berlaku secara umum untuk menyusun, menyajikan dan melaporkan keuangan secara konsisten dan dapat dipercaya. Pada tahun 2019, SAK EMKM menerangkan bahwa mengembangkan laporan keuangan, entitas wajib memiliki kemampuan untuk memisahkan antara kekayaan pemilik, aset, dan hasil usaha bisnisnya. Selain itu, harus mampu memisahkan transaksi dan hubungan keuangan antara dirinya dengan entitas lain (Muhardi, 2023).

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 dalam SAK EMKM menetapkan kriteria-kriteria yang jelas mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah (EMKM) sebagai berikut:

1. Kriteria Usaha Mikro. Ada dua kriteria usaha ini yakni:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00.
- 2. Kriteria Usaha Kecil. Kriteria ini meliputi:
 - a. Memiliki kekayaan bersih antara Rp50.000.000,00 dan Rp500.000.000,00.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan antara Rp300.000.000,00 dan Rp2.500.000.000,00.
- 3. Kriteria Usaha Menengah. Kriteria usaha ini meliputi:
 - a. Memiliki kekayaan bersih antara Rp500.000.000,00 dan Rp10.000.000.000,00.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan antara Rp2.500.000.000,00 dan Rp50.000.000.000,00.

Meski demikian, dalam kriteria-kriteria EMKM ini, nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan peraturan pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap sembilan narasumber, masing-masing mewakili kecamatan di Kabupaten Kudus, sementara data sekunder diperoleh dari dokumen pendukung dan literatur terkait. Populasi dalam penelitian ini adalah para pelaku UMKM di Kabupaten Kudus yang sudah terdata pada Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kudus tahun 2024, yang berjumlah 134 unit UMKM. Teknik pengambilan sampel adalah *random sampling*, dimana ada 5 narasumber yang dijadikan sampelnya. Dalam penelitian ini mendapatkan 5 narasumber yang telah menerapkan SAK EMKM yang ada di Kabupaten Kudus. Dalam penelitian ini ada 5 narasumber tersebut yang dipilih yaitu admin yang mana bertugas sebagai pelaku atau yang bertugas untuk membuat laporan keuangan dalam usaha yang dijalankan.

PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan oleh pelaku UMKM di Kabupaten Kudus.

- 1. Kendala implementasi penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM oleh pelaku UMKM di Kabupaten Kudus
 - a. Hasil Analisis Penerapan SAK EMKM dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada UMKM di Kabupaten Kudus

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, laporan keuangan Keripik kulit "Paquita" Kudus dulu ini hanya terdiri dari pencatatan, pemasukan, dan pengeluaran saja. Meskipun pemilik usaha telah memahami pentingnya pencatatan keuangan dalam pengelolaan usahanya yang sesuai dengan SAK EMKM, namun ia

memiliki tekad untuk mengimplementasikan pelaporan yang sesuai dengan SAK yang berlaku. Laporan keuangan yang dibuat lebih komprehensif, seperti laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan. Meskipun keseluruhan komponen laporan keuangan yang ada dalam SAK EMKM belum terpenuhi, setidaknya ada beberapa laporan yang masuk dalam standar pencatatannya.

Laporan keuangan yang disusun oleh Pabrik Tempe Pak Pitono telah mencakup beberapa komponen penting dalam SAK EMKM, seperti laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Hal ini menunjukkan bahwa pemilik usaha sudah mulai memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang lebih sistematis dan transparan. Meskipun laporan perubahan modal belum tersedia, pemilik usaha bertekad untuk terus meningkatkan kualitas pencatatan dan pelaporannya agar lebih sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selain itu, adanya catatan atas laporan keuangan menandakan upaya pemilik dalam memberikan informasi tambahan yang mendukung transparansi keuangan, meskipun belum seluruh komponen laporan keuangan yang ada dalam SAK EMKM terpenuhi.

Kemudian laporan keuangan yang disusun oleh Bika Bakar Santi mencakup laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Hal ini menunjukkan bahwa pemilik usaha sudah memiliki pemahaman tentang pentingnya pelaporan keuangan yang lebih terstruktur untuk mendukung pengelolaan usahanya. Namun, laporan perubahan modal belum tersedia, sehingga informasi mengenai perubahan dalam ekuitas selama periode tertentu tidak dapat disajikan. Meski demikian, adanya catatan atas laporan keuangan menjadi indikator positif bahwa pemilik usaha berusaha untuk memberikan penjelasan tambahan terkait angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, laporan keuangan Telur Asin Pak Said telah mencakup laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Hal ini menunjukkan bahwa pemilik usaha telah memahami pentingnya pelaporan keuangan yang lengkap sesuai SAK EMKM. Namun, catatan atas laporan keuangan belum tersedia, sehingga penjelasan tambahan terkait angka dalam laporan keuangan tidak dapat disajikan. Kendati demikian, laporan yang telah dibuat sudah cukup memberikan gambaran kondisi keuangan usaha secara menyeluruh dan mendukung pengelolaan usaha.

Laporan keuangan Toko Bangunan Semar telah mencakup laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Hal ini menunjukkan bahwa pemilik usaha sudah mulai menerapkan pelaporan keuangan

yang lebih terstruktur. Namun, laporan perubahan modal dan catatan atas laporan keuangan belum tersedia. Akibatnya, informasi terkait perubahan ekuitas dan penjelasan detail dalam laporan keuangan belum dapat disajikan. Meskipun demikian, laporan yang ada tetap membantu dalam memahami kondisi keuangan usaha.

- b. Kendala dalam pengimplemetasian penyusunan laporan keuangan UMKM Kripik Kulit “Paquita” menghadapi kendala pada tahap pencatatan, terutama dalam mencatat transaksi kecil seperti biaya operasional harian. Pemilik sering mengandalkan ingatan, sehingga catatan menjadi tidak lengkap dan rawan kesalahan. Pada tahap penggolongan, biaya operasional sering dicampur dengan biaya produksi, seperti bahan baku kulit, yang menyebabkan laporan keuangan sulit mencerminkan struktur biaya sebenarnya. Selain itu, UMKM ini belum menyusun laporan laba rugi atau laporan posisi keuangan, sehingga data yang ada hanya digunakan untuk kebutuhan internal tanpa diolah menjadi informasi yang berguna. Pada tahap pelaporan, laporan keuangan yang dibuat sangat sederhana dan belum memenuhi standar SAK EMKM, sehingga tidak dapat digunakan untuk kebutuhan eksternal seperti pengajuan pendanaan.

Pada UMKM Pabrik Tempe Pak Pitono, kendala utama terjadi pada pencatatan transaksi tambahan, seperti biaya gas, listrik, dan perawatan alat produksi, yang sering kali tidak dicatat. Hal ini menyebabkan biaya produksi tidak terefleksi secara akurat. Dalam penggolongan, semua transaksi dicatat dalam kategori umum tanpa memisahkan biaya tetap, variabel, atau utang usaha, sehingga laporan keuangan menjadi kurang informatif. Peringkasan data tidak dilakukan secara teratur karena pemilik merasa proses ini membutuhkan waktu yang lama dan tidak memberikan manfaat langsung. Akibatnya, laporan keuangan yang disusun hanya mencakup pemasukan dan pengeluaran tanpa mengikuti format lengkap sesuai SAK EMKM.

UMKM Bika Bakar Ibu Santi mengalami kesulitan dalam mencatat pengeluaran bahan baku utama, seperti tepung dan gula, terutama ketika pembelian dilakukan secara bertahap. Selain itu, biaya tambahan seperti gas dan listrik tidak tercatat dengan baik, yang membuat biaya produksi menjadi tidak lengkap. Pada tahap penggolongan, semua biaya produksi dicatat dalam satu kategori tanpa memisahkan komponen biaya, seperti bahan baku, tenaga kerja langsung, dan *overhead*, sehingga pemilik kesulitan mengetahui struktur biaya produksi. Peringkasan data juga belum optimal, karena laporan laba rugi tidak mencerminkan keuntungan usaha, dan data persediaan tidak diringkas dengan baik. Pada tahap pelaporan,

laporan keuangan yang dibuat hanya berupa pencatatan harian tanpa merujuk pada format yang sesuai SAK EMKM.

UMKM Telur Asin Pak Said menghadapi kendala dalam memisahkan transaksi pribadi dengan transaksi usaha, seperti pembelian bahan baku telur yang sering digabung dengan belanja rumah tangga. Pada tahap penggolongan, biaya produksi untuk berbagai varian produk, seperti telur asin bakar dan pedas, tidak dipisahkan, sehingga sulit untuk menghitung biaya per unit. Dalam peringkasan, data persediaan tidak diringkaskan dengan baik, sehingga pemilik tidak memiliki informasi tentang stok yang tersedia atau terjual. Kendala pada pelaporan adalah tidak adanya laporan formal yang dapat memenuhi kebutuhan pihak eksternal, seperti calon investor atau bank.

Kendala pencatatan pada UMKM ini terletak pada transaksi kecil yang dilakukan secara tunai, yang sering kali tidak dicatat karena dianggap tidak signifikan, meskipun jika diakumulasi dapat memengaruhi pendapatan harian. Dalam penggolongan, pendapatan dari barang utama, seperti semen dan pasir, dicampur dengan barang pelengkap, seperti alat tukang, sehingga analisis kontribusi masing-masing kategori produk menjadi sulit dilakukan. Peringkasan data juga tidak dilakukan untuk piutang pelanggan, yang menyebabkan pemilik kesulitan melacak pelanggan yang belum melunasi pembayaran. Pada tahap pelaporan, UMKM ini tidak menyusun laporan sesuai SAK EMKM karena merasa bahwa laporan formal hanya diperlukan oleh usaha besar.

2. Manfaat yang Diperoleh oleh Pelaku UMKM setelah Menerapkan SAK EMKM

Penerapan SAK EMKM memberikan manfaat signifikan bagi pihak internal, yaitu pemilik usaha, manajer, dan karyawan yang bertanggung jawab pada keuangan. Pemilik usaha dapat memahami kondisi keuangan secara lebih terstruktur, yang memudahkan pengambilan keputusan strategis, seperti ekspansi usaha atau pengelolaan risiko. Manajer terbantu dalam mengelola sumber daya, seperti persediaan dan tenaga kerja, karena laporan keuangan memberikan data valid untuk evaluasi operasional. Sementara itu, karyawan yang bertugas di bagian keuangan dapat meningkatkan keterampilan akuntansi dan meminimalkan kesalahan dalam pencatatan atau pelaporan, sehingga operasional keuangan UMKM berjalan lebih efektif dan efisien.

Bagi pihak eksternal, seperti investor, bank, pemerintah, pelanggan, dan supplier, penerapan SAK EMKM meningkatkan transparansi dan kepercayaan terhadap UMKM. Investor dan bank dapat mengevaluasi kondisi keuangan UMKM dengan mudah untuk

mendukung keputusan pembiayaan atau investasi. Pemerintah dan lembaga pajak terbantu dalam memantau dan mengelola kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional. Pelanggan memperoleh citra positif karena UMKM dianggap dikelola secara profesional, sementara supplier dapat menjalin kerja sama jangka panjang karena laporan keuangan mencerminkan kemampuan UMKM dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

Pelaku UMKM yang telah menerapkan SAK EMKM mengungkapkan bahwa mereka merasakan beberapa manfaat penting setelah mulai menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar tersebut. Manfaat pertama yang dirasakan adalah meningkatnya transparansi dan akurasi dalam pencatatan keuangan. Dengan adanya laporan keuangan yang lebih terstruktur dan sesuai dengan SAK EMKM, mereka dapat lebih mudah memantau kondisi keuangan usaha dan membuat keputusan yang lebih tepat terkait dengan pengelolaan arus kas dan pengembangan usaha. Manfaat lainnya adalah kemudahan dalam mengakses pembiayaan. Beberapa pelaku UMKM yang telah menerapkan SAK EMKM mengungkapkan bahwa mereka merasa lebih mudah mendapatkan pembiayaan dari bank atau lembaga keuangan lainnya, karena laporan keuangan mereka sudah memenuhi standar yang diperlukan. Selain itu, dengan laporan keuangan yang lebih terorganisir, mereka juga lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakan, karena laporan tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak yang harus dibayar. Beberapa narasumber juga menyatakan bahwa penerapan SAK EMKM memberikan kepercayaan diri yang lebih besar dalam menjalankan usaha mereka. Mereka merasa bahwa usaha mereka lebih profesional dan terkelola dengan baik, yang juga memberikan dampak positif dalam hubungan dengan pelanggan dan mitra bisnis.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Emanuel Darwis Yoseph Mite et al., 2023). Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa penggunaan informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap keberhasilan UMKM. Yang mana menemukan bahwa penggunaan informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap keberhasilan UMKM. Manfaat utama yang dirasakan UMKM yang menerapkan SAK EMKM adalah peningkatan kredibilitas laporan keuangan dan akses yang lebih baik ke sumber pendanaan. Temuan ini mendukung jurnal ini, yang menunjukkan bahwa informasi akuntansi yang baik dapat berdampak positif pada keberhasilan UMKM.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaku UMKM di Kabupaten Kudus menghadapi kendala dalam penerapan SAK EMKM, seperti

pencatatan transaksi kecil, penggolongan biaya yang tidak terstruktur, serta keterbatasan dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar. Hambatan utama meliputi rendahnya pemahaman akuntansi, minimnya SDM yang kompeten, dan kurangnya pendampingan teknis. Meski demikian, UMKM yang menerapkan SAK EMKM merasakan manfaat berupa peningkatan transparansi, kemudahan pengambilan keputusan, serta akses pendanaan yang lebih baik. Namun, mayoritas UMKM masih memerlukan edukasi dan pendampingan untuk memanfaatkan standar ini secara optimal. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan narasumber dan mengembangkan model pelatihan SAK EMKM yang lebih praktis dan mudah dipahami.

DAFTAR PUSTAKA

- AICPA (American Institute of Certified Public Accountants). (n.d.). Committee on Technology. In *AICPA Inc.* (New York).
- Ayu, A. D. P., & Banjarnahor, H. (2023). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan UMKM dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Batam. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi (SNISTEK)*, 5(September), 204-209. <https://doi.org/10.33884/psnistek.v5i.8086>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor*. September 2024. Vol. 41. No. 11.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI. (2016). *Exposure Draft Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan*.
- Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan. (2008). UU No 20 Tahun 2008 Mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39653/uu-no-20-tahun-2008?a=K7DWJZ>
- Emanuel Darwis Yoseph Mite, Maria Nona Dince, & Paulus Libu Lamawitak. (2023). Pengaruh Penggunaan Informasi Akuntansi terhadap Keberhasilan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi pada UMKM di Kecamatan Alok Kabupaten Sikka). *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(4), 99-112. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v1i4.843>
- Herwiyanti, Eliada, Permata Ulfah, U. P. (2020). Implementasi Standar Akuntansi Keuangan di UMKM. *Deepublish*.
- IAI. (2015). *PSAK No.1 dan 2 Laporan Keuangan*. In *Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI*.
- Indra, A. O. S. dan N. (2019). Pengetahuan Akuntansi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 4(Desember).
- Muhardi. (2023). Penerapan SAK-EMKM sebagai Dasar Penyusunan Laporan Keuangan EMKM (Studi Kasus pada Kopi Semilyar di Surabaya). *Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 2(4), 138-153. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v2i4>

- Putri, A. D. (2021). *Analisis Pengaruh Jumlah Unit UMKM, Jumlah Tenaga Kerja UMKM, Jumlah Ekspor Non Migas UMKM dan Jumlah Investasi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto Sektor UMKM Indonesia Periode 1999 – 2019*. 6.
- Rahardjo, S. S. (2020). *Akuntansi Suatu Pengantar Edisi 6*. Salemba Empat.
- Sastroatmodjo, S. dan Purnairawan E. (2021). *Pengantar Akuntansi*. Media Sains Indonesia.
- S. M. Rahayu, W. Ramadhanti, T. M. W. (2020). *Akuntansi Dasar Sesuai dengan SAK EMKM*. Deepublish.
- Sulistyawati, S. A. (2020). *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Latar Belakang, Pemberian Informasi dan Sosialisasi terhadap Pemahaman UMKM dalam Menyusun Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM (Studi Kasus pada Usaha Kecil Kabupaten Tegal)*. Skripsi Thesis. Universitas Pancasakti Tegal